Pemberian Wasiat *Wajibah* kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010

Giving Mandatory Wills to Non Muslim Wife According to Decision of The Supreme Court of RI No. 16K/AG/2010

Abdul Hadi Ismail*

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: abdulhadi@umsu.ac.id

Abstrak

Beragamnya agama yang ada di Indonesia, menyebabkan perkawinan beda agama rentan terjadi. Perkawinan beda agama akan berimplikasi kepada adanya kewarisan beda agama jika salah satu pasangan meninggal dunia, sehingga akhirnya akan menjadi sengketa waris. Para ulama fikih telah sepakat bahwa antara muslim dengan non muslim tidak saling mewaris, meskipun sebagian ulama membolehkan terjadinya peralihan harta melalui wasiat *wajibah*. Secara normatif tidak ada hukum positif yang mendasari pemberian wasiat *wajibah* kepada istri yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat *wajibah* kepada anak angkat atau orang tua angkat. Kekosongan hukum tersebut kemudian mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan untuk memberikan bagian harta dari suami/istri non muslim melalui mekanisme wasiat *wajibah*. Berdasarkan konsideran tersebut, maka perlu dipertanyakan bagaimana wasiat *wajibah* terhadap non muslim dalam perspektif KHI, serta apa yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung RI memutuskan pemberian wasiat *wajibah* kepada istri non muslim. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan yang menjadi dasar terbitnya Putusan Nomor 16 AK/G/2010 itu adalah rasa keadilan serta kemanusiaan, disebabkan istri telah mengabdikan dirinya selama 18 tahun dan bergaul dengan suami secara rukun dan baik.

Kata Kunci: wasiat, *wajibah*, istri, non muslim.

Abstract

The diversity of religions in Indonesia makes interfaith marriages vulnerable. Interfaith marriage will have implications for the inheritance of different religions if one partner dies, so that in the end it will become an inheritance dispute. The fiqh scholars have agreed that Muslims and non-Muslims do not inherit from each other, even though some scholars allow the transfer of property through wills. Compilation of Islamic Law only regulates the wills of the adopted children or adoptive parents. Normatively, there is no positive law that underlies the giving of a will to a wife who is not a Muslim. This legal vacuum prompted the Supreme Court of the Republic of Indonesia to give a decision to give a share of the assets of a non-Muslim husband/wife through a compulsory will. Based on this preamble, it is necessary to ask how the will for non-Muslims in the perspective of KHI, as well as what is the basis for the decision of the Supreme Court of the Republic Indonesia to decide on the granting of mandatory wills to non-Muslim wives. This research is a normative legal research with data sources derived from secondary data. The result of this research is that the consideration the basis for issuance of Decision Number 16 AK/G/2010 is a sense of justice as well as humanity, because the wife has devoted herself for 18 years and gets along her husband harmoniously and well.

Keywords: will, compulsory, wife, non-Muslim.

How to Cite: Ismail, A.H. (2020). Pemberian Wasiat *Wajibah* kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010. *Jurnal Mercatoria*. 13 (2): 131-142.

PENDAHULUAN

Lembaga wasiat dalam Islam bukanlah hal baru, karena selain pembagian warisan, ada juga pemberian wasiat yang telah diatur oleh Hukum Islam. Wasiat adalah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. (Ash-Shiddieqy, 2013)

Wasiat dalam hukum Islam pada dasarnya ditujukan kepada orang lain di luar ahli waris, atau terutama kepada ahli waris yang karena alasan lain seperti *mahjub* (terhalang oleh ahli waris lain) tidak mendapatkan warisan. Sedangkan wasiat terhadap ahli waris, hanya dimungkinkan bila ahli waris yang lain menyetujui pemberian wasiat dari *al-mushiy* (orang yang berwasiat). (Suma, 2004)

Belakangan ini terjadi sebuah dinamika dan kemajuan hukum terkait dengan isu kewarisan beda agama. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah membuat gebrakan baru terkait kewarisan

beda agama. Gebrakan tersebut dapat dengan nyata dilihat dari putusan-putusannya yang memberikan celah dan peluang kepada pihak non muslim untuk dapat menerima bagian harta pewaris Muslim. Peluang tersebut memang tidak disediakan dalam bentuk praktik kewarisan murni, tetapi dibuat dengan mempergunakan konsep atau aturan wasiat *wajibah*.

Paling tidak ada beberapa putusan MA RI yang memberikan putusan terkait pemberian wasiat *wajibah* bagi pewaris yang berbeda agama, yaitu Putusan MA RI Nomor 16K/AG/2010, serta Putusan MA RI Nomor 368K/AG/1995. Kedua Putusan MA RI itu kemudian menjadi diskusi hangat baik yang pro maupun kontra terhadap putusan tersebut. Banyak alasan, alibi, argumentasi diberikan untuk menerima dan menolak putusan tersebut. Bagi sebagian pihak, Putusan MA RI itu dianggap sebagai suatu kemajuan dalam pembagian harta peninggalan, sementara pada sisi lain pemberian wasiat *wajibah* dianggap bertentangan dengan Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada pertanyaan yang menarik untuk dijawab yaitu bagaimana dasar konsep pemberian wasiat *wajibah* kepada non muslim dalam perspektif KHI serta bagaimana dasar pertimbangan

Hakim MA RI dalam memutuskan pemberian wasiat *wajibah* kepada istri non muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti berdasarkan studi kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, konvensi internasional untuk mendapat data atau teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Pengertian *statute approach* adalah pendekatan masalah yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dikaji berdasarkan hukum positif dan pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wasiat *Wajibah* kepada Non Mulsim dalam Konteks Kompilasi Hukum Islam dan Syari'at Islam

Wasiat menurut bahasa artinya menyambungkan, yang berasal dari kata *washasy syai'a bikaza* artinya dia menyambungkannya. Dikatakan demikian

karena seseorang yang berwasiat berarti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. (Saebani, 2009). Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sepeninggalnya. Wasiat tersebut ditujukan untuk orangtua dan karib kerabat. (Alhafidz, 2013). Menurut syariat, wasiat adalah mendermakan suatu hal yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia. (Aziz, 2003)

Menurut Fatchur Rahman, disebut wasiat *wajibah* karena 2 (dua) hal, yaitu:

- Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. (Rahman, 1981)

Ketentuan wasiat *wajibah* merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 180, yaitu:

كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك
خيراً الوصية والأقربين

بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Dalam menginterpretasikan surat al-Baqarah ayat 180, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan. Oleh karena itu, pemberian wasiat *wajibah* kepada *walidayn* dan *aqrabin* yang mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan, dapat diterapkan dan dilaksanakan. (Usman, Soemawinata, 1997). Di sisi lain, sebagian berpendapat bahwa ketentuan wasiat *wajibah* tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah di-*nasakh*, baik oleh Al-Qur’an maupun Al-hadist. (Makhluf, 1958)

Wasiat *wajibah* ini di Indonesia sebenarnya mulai dikenal di tahun 90-an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia. Ini berarti bahwa wasiat *wajibah* merupakan

produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia. KHI di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* maksimal sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Tidak diketahui pasti alasan konsep wasiat *wajibah* hanya terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja.

Pengaturan wasiat *wajibah* dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat *wajibah* dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia. (Nugraheni, Ilhami & Harahab, 2010). Pasal ini dinilai ekstrim karena walaupun namanya wasiat *wajibah* namun dalam kenyataannya berarti memberi warisan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak sesuai dengan konsep wasiat *wajibah* dalam perspektif fikih yang ada di

beberapa negara Islam. (Basri, Wahab & Sarong, 2014)

Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat, yaitu, *pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam hukum adat. *Kedua*, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia. (Hartini, 2001)

KHI memberikan wasiat *wajibah* kepada anak angkat karena kenyataan hubungan yang tidak dapat dipungkiri secara hukum, maka Pasal 209 memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam hubungan waris mewarisi. Modifikasi ini berwujud bahwa anak angkat berhak mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, berdasarkan konstruksi hukum wasiat *wajibah*. Demikian juga sebaliknya orang tua angkat berhak mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan anak angkatnya berdasarkan pada konstruksi wasiat *wajibah*.

Dasar mengapa wasiat *wajibah* dalam KHI diberikan wasiat *wajibah* kepada orang tua angkat atau anak angkat adalah karena tanggung jawab terhadap anak angkat tidak hanya terletak pada tanggung jawab untuk memberi nafkah dan perawatan, namun juga kedudukannya yang setara antara anak angkat dengan anak kandung. Atas dasar itu, terkadang nama ayah angkat selalu melekat kepada anak angkatnya sebagai identitas pribadi. Anak angkat dianggap mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung terhadap orang tuanya dan begitu pula sebaliknya. (Al-Ghazali, 2016)

Wasiat *wajibah* di Indonesia dijadikan sebagai dasar oleh KHI untuk memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya), atau orang tua angkat yang tidak diberikan wasiat oleh pewaris (anak angkatnya). Dalam KHI, penerima wasiat *wajibah* adalah anak angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan orang tua angkatnya, ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari harta peninggalan anak angkatnya ketika anak angkat tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan demikian, wasiat *wajibah* untuk orang tua angkat atau anak angkat diperlukan, meskipun keberadaannya tidak harus dibuka selebarnya sehingga memengaruhi bagian *fard* para ahli waris, dan tidak perlu juga harus dihapus ketentuan wasiat *wajibah* dalam rangka perwujudan apresiasi terhadap pewaris sebagai orang tua angkatnya yang mengangkatnya karena kasih sayang.

KHI sama sekali tidak membicarakan tentang wasiat *wajibah* yang diberikan kepada suami/istri yang non muslim. Alasan logis yang dapat dijadikan alibi adalah bahwa hampir semua substansi dari pasal-pasal yang terdapat dalam KHI berasal dari kitab-kitab fikih klasik yang tidak membahas sama sekali tentang wasiat *wajibah* untuk ahli waris yang non muslim.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 16K/AG/2010

Pewaris bernama Muhammad Araya bin Renreng alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang istri yang bernama Evie Lany Mosinta, beragama Kristen. Keduanya melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 November 1990 di Bo'e

Kabupaten Poso, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta, tidak dikarunia seorang anak.

Menurut ketentuan Hukum Islam, maka Evie Lany Mosinta yang beragama Kristen, tentu tidak mendapatkan harta warisan karena perbedaan agama. Ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng yaitu Halimah Daeng Baji (ibu kandung), Murnihati binti Renreng (saudara kandung), Mulihayati binti Renreng (saudara kandung), Djelintahati binti Renreng (saudara kandung), Aarsal bin Renreng (saudara kandung). Almarhum Muhammad Armaya bin Renreng meninggalkan beberapa harta benda dalam perkawinannya dengan Evie Lany Mosinta baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang seluruhnya masih dalam penguasaan Evie Lany Mosinta, dan belum diserahkan atau dibagikan kepada para ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng.

Kasus tersebut kemudian bergulir sampai ke Pengadilan Agama Makassar, dan kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, hingga sampai kasasi ke MA RI. Melalui kuasa hukumnya, Evie Lany Mosinta mengajukan

permohonan kasasi ke MA RI, yang disertai dengan memori kasasi.

Putusan MA RI Nomor 16K/AG/2010, memutuskan bahwa tergugat (Evie Lany Mosinta) berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng. Alasan yang diajukan oleh Hakim MA RI dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perkawinan antara pewaris dengan pemohon kasasi (Evie Lany Mosinta) telah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, yang berarti Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris juga cukup lama. Oleh karena itu meskipun Pemohon Kasasi seorang non muslim, namun layak dan sangat adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat *wajibah* serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi MA RI dan sesuai dengan rasa keadilan.

Menurut Majelis Hakim MA RI, kedudukan ahli waris non muslim telah banyak dikaji oleh para ulama seperti Yusuf al-Qardhawi yang menginterpretasikan bahwa orang-orang non muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan

sebagai kafir *harby*. Demikian pula halnya dengan Pemohon Kasasi yang hidup selama 18 tahun bersama pewaris, yang semasa hidup, bergaul secara rukun dan damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat *wajibah*.

Pertimbangan Majelis Hakim MA RI yang memberikan wasiat *wajibah* kepada pemohon kasasi untuk memenuhi rasa keadilan adalah sudah tepat karena salah satu tujuan dimaksudkannya suatu perkara ke dalam pengadilan adalah untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri. Dalam hal ini Majelis Hakim MA RI telah melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada bunyi yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang saja. Oleh karena perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah berlangsung selama 18 tahun dan hidup akur serta alasan putusnya perkawinan karena kematian bukan perceraian. Dalam hal ini, maka putusan Hakim Mahkamah Agung RI memberikan wasiat *wajibah* kepada Evie Lany Mosinta.

Apabila dianalisis secara lebih lanjut berbagai putusan MA RI tidak ditemukan ada Hakim MA RI merujuk kepada peraturan lain selain Kompilasi

Hukum Islam serta tidak pula ditemukan Hakim MA RI membuat putusan sendiri diluar apa yang telah tertera dalam KHI. (Tono, 2014). Artinya Hakim MA RI menganalogikan pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat, lalu dikaitkan dengan pemberian wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim.

Pemberian wasiat *wajibah* bagi seorang janda non muslim sebesar bagian ahli waris muslim merupakan upaya penemuan hukum dari Hakim MA RI pada Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010. Keputusan Hakim MA RI tersebut harus dihargai keberadaannya, selama besarnya wasiat *wajibah* tidak melebihi batas pemberian wasiat yang diatur dalam Hadis dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KHI sangat jelas menyebutkan bahwa aturan hukum mengenai pemberian wasiat *wajibah* di Indonesia hanya bagi orang tua angkat atau angkat saja, tidak dianalogikan kepada para kerabat yang tidak berhak menerima warisan baik karena beda agama atau karena terdinding (terhijab). (Rizkal, 2016). Artinya berbagai putusan hakim yang memberikan wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim, menerobis ketentuan yang termaktub dalam KHI. KHI yang lebih merujuk pada pendapat ulama klasik yang jelas menegaskan bahwa

perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. (Apriyudi, 2018)

Upaya Hakim MA RI pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010 dalam menerapkan konsep wasiat *wajibah* bagi seorang janda non muslim merupakan upaya perwujudan hukum Islam ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010 merupakan suatu alternatif penyelesaian untuk mengatasi persoalan ahli waris yang telah kehilangan hak, khususnya dalam perkara ini, dimana perbedaan agama sebagai penyebab hak waris yang hilang dapat diterobos dengan wasiat *wajibah*.

Putusan MA RI terkait dengan pemberian wasiat *wajibah* terhadap ahli waris non muslim berdasarkan bagian ahli waris yang non muslim ketika beragama Islam, maka jumlah wasiat *wajibah* yang didapatkannya tentunya akan melebihi maksimal wasiat *wajibah* yang telah ditentukan, yaitu sebesar 1/3 yang justru tidak sesuai dengan aturan bagian satu porsi maksimal wasiat *wajibah* seperti hadist Nabi Muhammad Saw dan KHI pasal 209. (Arif, 2017)

Terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 memberikan suatu sudut pandang terhadap Agama Islam, bahwa Islam menganut asas

keadilan dan kebaikan antar sesama manusia. Terbitnya putusan tersebut juga memberikan warna bahwa Islam mengajarkan perdamaian, serta memungkinkan interaksi antar umat beragama yang saling memberi manfaat dan membantu dalam koridor kebaikan.

Pertimbangan hakim tentunya berbeda meskipun kasusnya sama, terkait dengan ketentuan wasiat *wajibah*, meskipun ada satu asas yang dianut yaitu asas keseimbangan. Sebenarnya pemberian wasiat *wajibah* tidak mengganggu kedudukan ahli waris lain. Bagian harta peninggalan yang diperuntukkan untuk wasiat *wajibah* diberikan dengan derajat yang sama. Istri yang tidak beragama Islam, akan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan kedudukannya sebagai isteri. (Syafi'i, 2017)

Pemberian wasiat *wajibah* terhadap non muslim merupakan upaya untuk melihat bahwa ada dinamika di tengah-tengah masyarakat yang tidak mungkin untuk diabaikan, karena sifatnya yang sangat dinamis. Hukum Islam harus mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat, oleh karena itu tidak boleh kaku, harus fleksibel (*murunah*) serta sesuai dengan tuntutan zamannya. Adanya upaya para

ulama untuk memberlakukan wasiat *wajibah*, merupakan langkah maju bahwa hukum Islam mampu memberikan maslahat dan penerapan hukum tersebut relevan dengan kondisi kekinian umat Islam di Indonesia.

Melalui Putusan MA RI Nomor 16K/AG/2010, Majelis Hakim MA RI, seolah ingin menegaskan bahwa menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Untuk menemukan dan menegaskan keadilan dalam putusan, tidak cukup menggunakan logika peraturan saja tetapi menggunakan logika sosial dan hati nurani. Di samping asas keadilan, pertimbangan lain yang dipakai dalam memberikan wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim adalah nilai kemanusiaan (*humanity/insaniyyah*), yang bermakna hukum yang tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dianggap sebagai hukum yang dilihat dari sisi substansial. Pertimbangan lain dilihat dari sisi bahwa hukum diciptakan untuk merekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan pada kesejahteraan sosial. (Labone, 2020)

Hingga saat ini pemberian wasiat *wajibah* terhadap ahli waris beda agama telah diterapkan dalam beberapa putusan

pengadilan seperti dalam Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 218K/AG/2016. Terbitnya yurisprudensi terkait dengan pemberian wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim tentu menjadi pelepas dahaga bagi non muslim untuk memperoleh bagian harta warisan dengan jalur wasiat *wajibah* sebagai tanda tegaknya moralitas dan keadilan. (Raharjo & Putri, 2019). Logika hukum yang dipakai oleh mayoritas hakim dalam menyelesaikan kasus kewarisan beda agama melalui wasiat *wajibah* adalah bahwa hubungan kekerabatan dinilai lebih utama apabila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai sebagai penghalang untuk dapat saling mewaris. (Herenawati, Sujana & Kusuma, 2020)

Pro kontra pendapat terkait pemberian wasiat *wajibah* terhadap ahli waris non muslim tetap saja bergulir dengan berbagai argumentasinya. Perlu pula untuk melihat, bahwa hampir semua pertimbangan dalam putusan MA RI terkait pemberian wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim, didasarkan pada adanya hubungan yang baik antara keduanya (biasanya kasus waris ini melibatkan kasus perkawinan beda agama), hidup rukun selama menjadi pasangan suami istri, merawat suami atau istri ketika sakit hingga wafatnya. (Noviyanti & Mulati, 2019)

Banyak pihak yang menganggap bahwa Putusan MA RI Nomor: 16K/AG/2010 merupakan bagian dari penemuan hukum, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena sesuai dengan pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi. Berbagai putusan oleh MA RI yang berkaitan dengan wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim telah mengisi kekosongan hukum dalam masalah ahli waris non muslim, serta memberikan kepastian hukum akan hak atas harta peninggalan atau harta bersama. (Kamaruddin, 2015)

Apabila dilihat dari perspektif para pembaharu Islam, maka pemberian wasiat *wajibah* mendapat dukungan dari banyak pihak. Abdullah Ahmad An-Na'im, Asgar Ali Engineer, Nurcholis Madjid dan juga Jaringan Islam Liberal (JIL) adalah sebagian nama-nama populer yang mendukung adanya kewarisan beda agama dengan baju wasiat *wajibah*. Dalam pandangan mereka fikih klasik yang melarang kewarisan beda agama dinilai lebih mengedepankan pandangan antagonistik terhadap penganut agama lain. Fikih klasik bagi mereka tidak lagi mampu membendung arus perubahan sosial, sehingga mengakibatkan rumusan yang terdapat dalam fikih klasik tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian. (Abubakar, 2017)

SIMPULAN

KHI sama sekali tidak membicarakan tentang wasiat *wajibah* yang diberikan kepada suami/istri yang non muslim. KHI hanya membicarakan pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat atau orang tua angkat. KHI yang hanya mengakomodir wasiat *wajibah* hanya terhadap anak angkat sebagai bagian dari upaya mengapresiasi serta mengakomodir dinamika yang terjadi di masyarakat yang banyak melakukan pengangkatan anak serta menghormati keberadaan anak angkat.

Dasar pertimbangan Hakim MA RI dalam Putusan Nomor 16K/AG/2010 adalah bahwa pemohon kasasi telah hidup bersama dengan pewaris sebagai suami istri selama 18 tahun, yang artinya pemohon kasasi telah mengabdikan dirinya kepada pewaris dalam jangka waktu yang cukup lama. Hakim MA RI menilai meskipun pemohon kasasi seorang non muslim, namun layak dan sangat adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat *wajibah* serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi MA RI dan sesuai dengan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Ali. (2017). Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah. *Media Syaria*, 18 (1): 45.
- Alhafidz, Ahsin W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. (2013). *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. (2003). *Fathul Mu'in*. Jilid 2. Terjemahan Moch. Anwar, Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Hasanain Muhammad Makhluaf. (1958) *Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islami*. Kairo: Lajnah al-Bayyan al-'Arbay.
- Rahman, Fathur. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif.
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suma, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Suparman, Yusuf Somawinata. (1997), *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor No.16K/AG/2010.

Jurnal

- Al-Ghazali, Muhammad. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Qiyas*, 1 (1): 104.
- Apriyudi, Eka. (2018). Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. *Kertha Patrika*, 40 (1): 53.
- Arif, Muhammad Rinaldi. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Antara Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995). *Jurnal De Lega Lata*, 2 (2): 364-365.
- Basri, Hasan, Amiruddin A. Wahab & A. Hamid Sarong. (2014). Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat). *Jurnal Ilmu Hukum*

- Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2 (2): 60.
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana & I Made Hendra Kusuma. (2020). Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat *Wajibah* Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16 (1):30.
- Kamaruddin. (2017). Penerapan Wasiat *Wajibah* Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010). *Jurnal Mizani*, 25 (2): 22.
- Labone, Moh. Sukran R. (2020). Pemberian Wasiat *Wajibah* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010). *Tadulako Master Journal*, 4 (1): 62.
- Noviyanti, Liana, Mulati. (2019). Penerapan Wasiat *Wajibah* Terhadap Non Muslim Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 331/K/AG/2018/MA. *Jurnal Hukum Adigama*, 2 (2): 23.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami & Yulkarnain Harahab. (2010). Pengaturan Dan Implementasi Wasiat *Wajibah* Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 22 (2): 312.
- Raharjo, Ali Pamungkas, Elok Fauzia Dwi Putri. (2019). Analisis Pemberian Wasiat *Wajibah* terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1 (2), 2019: 179.
- Rizkal. (2016). Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non Muslim Berdasarkan Wasiat *Wajibah* Kajian Putusan Nomor 16K/AG/2010. *Jurnal Yudisial*, 9 (2): 184.
- Syafi'i. (2017). Wasiat *Wajibah* Dalam Kewarisan Islam Di Indonesia, *Misykat*, 02 (02): 128.
- Tono, Sidik. (2014). Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Tentang Wasiat *Wajibah*. *Jurnal Millah*, 14 (1): 132.